
Untuk "Bhayangkara" :

"KROCOJIWO" YANG ADIGANG-ADIGUNG-ADIGUNA

Oleh Aswino

Kecenderungan memakai istilah asing telah banyak dibahas oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh para Ahli Bahasa dan Pemerhati/Pengamat, tetapi juga oleh para Ahli/Budayawan yang berlatar belakang disiplin ilmu yang amat berlainan. Hingga kini "gong" pendapat pihak yang kurang menyukai pemakaian istilah asing ada pada Dr. Soedjoko yang sekaligus mendukung pernyataan Menmud/Sekab Drs. Moerdiono sebelumnya, dan pihak yang cenderung menyetujui penggunaan istilah universal ada pada kubu Prof. Mr. Sutan Takdir Alisyahbana yang masih segar produktif dalam usia 80 tahun. Banyak terlontar pernyataan pesimis tentang masa depan perkembangan Bahasa Indonesia yang mantap, tetapi biarlah sejarah memahat jalan kehidupan media komu-

nikasi nasional kita ini untuk mengkristal secara wajar dan alamiah.

Tulisan Dr. Soedjoko di KOMPAS tanggal 27 - 1 - 1988 tentang "krocojiwo," yang pada mulanya di fokuskan sebagai pengganti istilah asing "inferiority complex/minderwaardigheids-complex", ternyata telah berkembang dalam penalaran yang lebih kompleks. Unik juga apa yang dia ungkapkan, bahwa dari 1000 (250 di antaranya sarjana) orang yang selama 10 tahun diteliti paling suka ber"cas-cis-cus" bahasa Asing ternyata sebenarnya kurang mampu berbahasa Asing dengan baik. Dan yang paling memprihatinkan ialah bahwa dari 250 Sarjana yang dia tatar, selain belum pernah menjamah Kamus Bahasa Indonesia, banyak yang tidak terampil menggunakan kamus.

"Adigang - adigung - adiguna" menurut W.J.S. Poerwodarminta dalam BAOESASTRA DJAWI-INDONESIA tahun 1948 bermakna filosofis yang luas, namun dalam perkembangannya mempunyai makna konotatif sebagai berikut : Adigang, membangga-banggakan kekuatan; adigung, membangga-banggakan kebesaran; adiguna, mengagung-agungkan kepandaiannya.

Jelas kiranya bahwa ketiga istilah sebagai keseluruhan tersebut mempunyai konotasi yang a-sosial, yang penuh kesewenang-wenangan, yang kurang manusiawi. Dengan demikian apakah "krocojiwo yang adigang-adigung-adiguna" tersebut harus kita waspadai, marilah kita renungkan bersama.

Pahatan sejarah membuktikan bahwa selama berabad-abad sebelum hari Proklamasi Kemerdekaan, kita bangsa Indonesia secara bekesinambungan telah menerima perlakuan kurang senonoh dari para Penguasa yang beradigung-adigung-adiguna. Oleh karena itu identitas Bangsa Indonesia yang merdeka baru kemudian kita temukan. Bukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan bukan juga pada tanggal 28 Desember 1949 (sehari setelah Proklamasi dan setelah Penyerahan/Pengakuan Kedaulatan). Sementara itu ditemukannya identitas untuk mengkrystal menjadi kepribadian

bangsa memakan waktu yang cukup lama. Dan dalam masa transisi kristalisasi pribadi tersebut banyak kekikukan serta "salah tingkah" tampak menonjol akibat peralihan status "dijajah" ke "merdeka", kepribadian terjajah ke penampilan sebagai Tuan Rumah baru di Negeri sendiri. Berbagai upaya dengan sadar sesadarnya ditempuh untuk melompati kepribadian transisional tersebut dengan serba coba-coba (trial & error). Ada yang karena ketidaktahuannya menjadi bagai "kere munggah bale" (pengemis yang selalu ada di lantai tanah, naik ke balai-balai berpanggung/kehormatan), dan yang lain cenderung mempersulit proses pelayanan. Mulai dari urusan kelahiran (Akte Jatidiri dan Tempat Kelahiran), Proses Pendewasaan (Pengobatan, perawatan, penyembuhan klinis/medis, KTP/SIM/STNK/BPKB dan lain-lain. Surat Keterangan, Urusan Sekolah dan Kerja, Urusan Perkawinan, dan sebagainya) serta Kesehatan dan Kematian, bahkan dalam kiprah pembudayaan wajib pajak pun untuk membayar / memenuhi kewajibannya kepada negara pun masih menemui pelayanan yang bersifat mempersulit. Agaknya mereka (para Pelayan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat) itu lupa bahwa setiap orang perlu saling membantu dalam siklus

hidupnya yakni "janma-jara-wiyoga-marana" sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang kita dari ajaran India yang berarti "kelahiran-menjadi tua dengan segala problemanya - sakit - meninggal".

Mental mempersulit ini semakin terasa semenjak segala jasa serta budi baik seseorang cenderung DINILAI dengan materi/uang. Maka lahirlah budaya "uang pelicin/semir, jalan belakang, main tembak, dan sebagainya," agar urusannya cepat dilayani. Dan bentuk lain yang muncul pula adalah "main memo, main relasi/ketebelece, dan sebagainya," yang banyak menimbulkan frustrasi bagi yang tak mampu menjangkau budaya tersebut. Beberapa pengamat dan peneliti telah mensinyalir ancaman yang laten yang ditimbulkan oleh pembudayaan demikian itu di dalam dunia pendidikan serta penerimaan tenaga kerja. Dan apabila mental mempersulit yang korup ini dibiarkan berlarut dalam masyarakat luas, maka masuk akallah bahwa masyarakat Kepolisian/ABRI pun pasti terjamah oleh hakekat ancaman tersebut.

"O-E-C-O" (Open, Etis, "Crime Hunter", Ojo dumeh) oleh banyak pihak dianggap sublimasi pintas agar setiap anggota POLRI lebih profesional dan proporsional dalam

melayani masyarakat. Dan prinsip-prinsip penuntun KAPOLRI tersebut ternyata banyak relevansinya dengan penangkalan mental mempersulit dan korup tersebut sebagai salah satu aktualisasi mental "krocojiwo yang adigang-adigung-adiguna".

Pada tanggal 9 Februari Pangab berseru kepada para Komandan (cq. para Kapolres, Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapus Kodalops Polda, Kapusdik, dan para Wakapolda) agar mereka ikut terjun langsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka mengupayakan peningkatan pengabdian serta meniadakan citra negatif masyarakat atas POLRI. Pengarahan Pangab yang bertitik berat pada upaya terciptanya rasa aman dan tertib dalam masyarakat secara proporsional, telah dilanjutkan oleh KAPOLRI dengan beberapa pencahangan. Dua di antaranya adalah perlunya setiap anggota POLRI memiliki "budaya membaca", dan agar seluruh anggota mengenakan seragam POLRI secara bersahaja sesuai ketentuan (tanpa perhiasan cincin/kalung/gelang serta gelang akar bahar). Dan dengan restu KAPOLRI maka Gubernur PTIK telah menyelenggarakan acara tatap muka antara seluruh Kapolres Peserta Penataran di Sukabumi terse-

but serta KAPLESDIK, alumni PTIK Angkatan XII s/d XXII dengan Jajaran Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Diharapkan dari tatap muka tersebut selain merupakan upaya pelebagaan kontak komukatif antara Alumni dengan Almaternya (Garba Wiyata Luhur PTIK), secara langsung dan terbuka dapat dihimpun masukan timbal balik dalam rangka pematapan cakrawala kepemimpinan/profesi, yang disemangati oleh sa-santi "saling asah-saling asih-saling asuh".

Mental "krocojiwo yang adigang-adigung-adiguna" tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama dalam

pribadi-pribadi POLRI, baik secara individu maupun sebagai korsa. Dan setelah keberhasilan pelaksanaan tugas nasional dalam pengamanan Pemilu 1987, embanan POLRI masih diuji kembali dalam pelaksanaan pengamanan berlangsungnya Sidang-Sidang Umum MPR. Semoga POLRI dengan segala keterbatasannya tetap berhasil !

Jakarta, Akhir Februari 1988.

A S W I N O

